DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 5 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MITIGASI BENCANA DI DESA BONTO KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI

Usbar[1], Syamsuddin[2], Abd. Wahid[3],

Universitas Muhammadiyah Sinjai[1,2,3]
[1]muhammadusbar8@gmail.com [2]syam.sinjaiku@gmail.com,
[3]abdwahid8889@gmail.com.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village governments in disaster mitigation efforts in Bonto Katute Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. This village is an area with hilly geographical conditions that are prone to landslides and strong winds, so it demands an effective mitigation strategy. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews with village and community officials, and documentation. Based on preliminary data, the number of people affected by the landslide disaster until 2024 is 21 households. With limited infrastructure, human resources, and funding are common obstacles in the implementation of optimal mitigation in this village. The results of the study show that the Bonto Katute Village government has played a fairly active role in disaster mitigation through several main aspects. First, the integration of mitigation programs into village development planning and the preparation of village regulations that support environmental conservation. Second, the implementation of socialization and community education routinely collaborates with the Sinjai Regency BPBD. Third, the development of mitigation infrastructure such as soil retaining talud, drainage, and evacuation routes financed through village funds. Fourth, the provision of emergency facilities and the formation of disaster preparedness community groups as an effort to strengthen citizens' preparedness. Fifth, cross-sector coordination with BPBD, TNI, Polri, and NGOs in disaster management, both during emergency response and post-disaster rehabilitation.
However, this study also found a number of obstacles such as budget limitations, low awareness of some people in protecting the environment, and lack of early warning technology. Overall, the role of the village government in disaster mitigation in Bonto Katute Village is quite good even though it is not optimal. Therefore, it is necessary to optimize the budget, increase public awareness, use simple technology for early warning, and strengthen the institution of disaster preparedness villages so that Bonto Katute Village can become a disaster-resilient village in Sinjai Regency.

Keywords : Role; Village Government; Disaster Mitigation

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 5 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam upaya mitigasi bencana di Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Desa ini merupakan wilayah dengan kondisi geografis perbukitan yang rawan terhadap tanah longsor, dan angin kencang, sehingga menuntut adanya strategi mitigasi yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat, serta dokumentasi. Berdasarkan data awal jumlah masyarakat yang terkena dampak bencana tanah longsor sampai tahun 2024 sebanayak 21 KK. Dengan Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pendanaan menjadi hambatan umum dalam penerapan mitigasi yang optimal di desa ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bonto Katute telah berperan cukup aktif dalam mitigasi bencana melalui beberapa aspek utama. Pertama, integrasi program mitigasi ke dalam perencanaan pembangunan desa serta penyusunan peraturan desa yang mendukung pelestarian lingkungan. Kedua, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masyarakat secara rutin bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sinjai. Ketiga, pembangunan infrastruktur mitigasi seperti talud penahan tanah, drainase, dan jalur evakuasi yang dibiayai melalui dana desa. Keempat, penyediaan sarana darurat serta pembentukan kelompok masyarakat siaga bencana sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan warga. Kelima, koordinasi lintas sektor dengan BPBD, TNI, Polri, dan LSM dalam penanganan bencana, baik saat tanggap darurat maupun rehabilitasi pascabencana.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta minimnya teknologi peringatan dini. Secara keseluruhan, peran pemerintah desa dalam mitigasi bencana di Desa Bonto Katute sudah cukup baik meskipun belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi anggaran, peningkatan kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi sederhana untuk peringatan dini, serta penguatan kelembagaan desa siaga bencana agar Desa Bonto Katute dapat menjadi desa tangguh bencana di Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci : Peran; Pemerintah Desa; Mitigasi Bencana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana alam di dunia, menempati peringkat kedua setelah Filipina berdasarkan World Risk Report (WRR) 2023 dengan skor indeks risiko bencana sebesar 43,5 dari 100 (Ira Monalia 2024). Indonesia secara geografis terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik serta berada dalam kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire). Selain itu, kondisi iklim tropis dan karakteristik geografisnya menjadikan wilayah ini sangat

rentan terhadap bencana geologi dan hidrometeorologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan (Muhammad Feri Prasnanda 2024). Dampak dari bencana tidak hanya terbatas pada kerugian materil seperti kerusakan bangunan dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup kerugian non-materiil seperti hilangnya nyawa manusia, trauma psikologis, dan terganggunya kehidupan sosial-ekonomi Masyarakat (Indonesia 1999), khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses, informasi, dan sumber daya.

Dalam konteks kerentanan yang tinggi tersebut, upaya penanggulangan bencana menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda. Salah satu pendekatan strategis dalam kerangka penanggulangan bencana adalah mitigasi, Mitigasi diartikan sebagai upaya mengurangi dan mencegah risiko kehilangan jiwa dan harta benda baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural (Kiki Rasmala Sani 2020). Dalam praktiknya, keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada efektivitas koordinasi, perencanaan, dan implementasi di tingkat lokal, termasuk di desa.

Pemerintah desa sebagai struktur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi risiko bencana secara langsung di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk menjalankan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat (BPK RI, 2014), termasuk dalam hal penanggulangan bencana. Oleh karena itu, desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga berperan aktif sebagai aktor utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan mitigasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal

Di Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tantangan mitigasi bencana menjadi perhatian penting mengingat karakteristik geografis wilayah yang rawan

terhadap bencana tanah longsor akibat topografi perbukitan dan curah hujan tinggi. Berdasarkan data awal jumlah masyarakat yang terkena dampak bencana tanah longsor sampai tahun 2024 sebanayak 21 KK. Dengan Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pendanaan menjadi hambatan umum dalam penerapan mitigasi yang optimal di desa ini. Namun demikian, peran aktif pemerintah desa dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melibatkan masyarakat dalam berbagai upaya pengurangan risiko bencana menjadi kunci utama dalam membangun ketangguhan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam proses mitigasi bencana di Desa Bonto Katute berdasarkan realitas di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif melalui data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas peran pemerintah desa, tantangan yang dihadapi, serta strategi kolaboratif yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sistem mitigasi berbasis masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, non-alam, dan social (Indonesia, 2007). Klasifikasi lainnya yang banyak digunakan adalah berdasarkan asal usulnya, seperti geologi, hidrometeorologi, biologis, dan sosial (Chaudhary and Piracha 2021). Pemahaman ini penting untuk menentukan pendekatan penanggulangan yang tepat di setiap konteks wilayah.

Dalam literatur kebencanaan Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana (Arsyad 2017). Mitigasi bencana dibedakan menjadi dua bentuk, yakni Mitigasi struktural yang merujuk pada tindakan fisik untuk mengurangi dampak bencana, seperti pembangunan gedung tahan gempa dan infrastruktur pendukung lainnya serta mitigasi non struktural mencakup tindakan non fisik, seperti kebijakan, peningkatan kesadaran publik, pendidikan kebencanaan, serta penyebaran informasi yang bertujuan membentuk kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi (Sugiharyanto 2015).

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana karena berada pada garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat terdampak. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan pembangunan termasuk dalam aspek kebencanaan (BPK RI, 2014).

Pemerintah desa berperan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang memuat komponen kesiapsiagaan dan mitigasi. Selain itu, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi salah satu program yang mendorong peran aktif pemerintah desa dalam pengelolaan risiko bencana berbasis Masyarakat. Destana memiliki kapasitas untuk mengenali potensi bencana, mengurangi potensi bencana serta mampu mengorganisasi semua elemen dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kebencanaan (Admiral Musa et al. 2020). Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Sugianto and Ismanto 2025) menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana di tingkat desa sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta alokasi anggaran yang memadai. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator, khususnya dalam proses

musyawarah perencanaan pembangunan desa serta dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa.

Pendekatan *Community-Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR) telah menjadi paradigma utama dalam manajemen risiko bencana modern. *Community-Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR) adalah pendekatan dalam penanggulangan bencana yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dalam identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko bencana. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana, sehingga tindakan yang diambil lebih relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan lokal (Fitriana Selvia 2024). Dalam konteks desa, pendekatan ini sangat relevan mengingat kedekatan sosial dan kultural antar warga yang memudahkan koordinasi dan kolaborasi.

Wilayah perdesaan memiliki kondisi geografis dan sosial yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Banyak desa di Indonesia terletak di kawasan rawan bencana seperti lereng gunung, pinggiran sungai, atau wilayah pesisir. Hal ini membuat desa memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap bencana. Namun, keterbatasan dalam akses teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam implementasi mitigasi di perdesaan. Meskipun demikian, nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kearifan lokal, dan ikatan sosial yang kuat dapat menjadi modal sosial yang mendukung strategi mitigasi berbasis komunitas.

Berbagai studi menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil dalam mitigasi umumnya memiliki komitmen kuat dari aparat desa serta keterlibatan aktif masyarakat. Studi oleh (Sarwadi, Aliyah, and Istanabi 2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Nglebak dan Kelurahan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, berada pada tingkat yang tinggi dalam kegiatan mitigasi bencana longsor. Kedua wilayah tersebut memiliki bentuk

partisipasi masyarakat yang serupa, yaitu berupa kontribusi dalam bentuk pemikiran, tenaga, uang, dan barang. Dari keempat bentuk tersebut, partisipasi tenaga merupakan jenis kontribusi yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat di kedua desa berada pada tingkat "Partnership" dengan partisipasi tinggi, menunjukkan kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan upaya mitigasi bencana longsor.

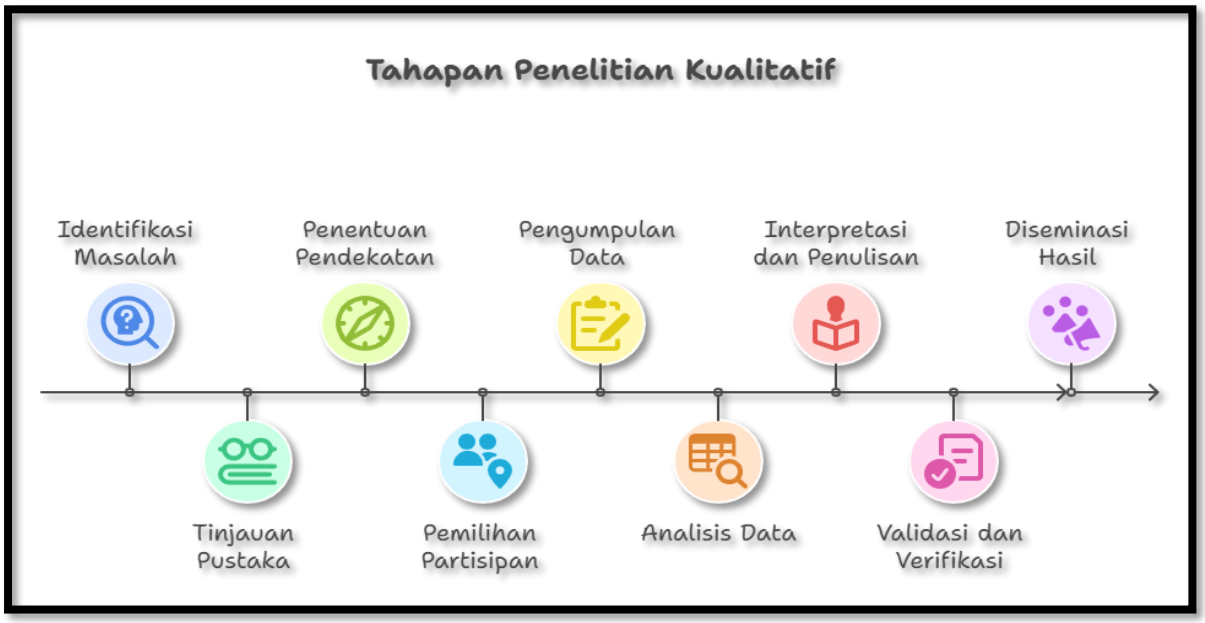
Dengan potensi bencana yang rentan di Kabupaten Sinjai, terkhususnya di Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, penting untuk memahami bagaimana pemerintah desa dan masyarakat merespons ancaman tersebut melalui langkah-langkah mitigasi. Desa ini memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan angin kencang, yang memerlukan strategi penanggulangan berbasis lokal.

Melalui kajian pustaka dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah berbagai literatur yang membahas kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa, serta memadukannya dengan realitas di lapangan. Penelitian ini menelusuri sejauh mana kebijakan, peran pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat membentuk sistem mitigasi yang responsif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis terkait peran pemerintah desa dalam mitigasi bencana. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan realitas implementasi mitigasi bencana di Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang pernah

terdampak bencana. Selain itu, teknik observasi juga diterapkan untuk mengamati secara langsung kondisi geografis dan potensi risiko bencana di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, (3) penilaian data dengan cara mengkategorikan data primer dan sekunder berdasarkan kesesuaian terhadap fokus penelitian, dan (4) interpretasi data melalui analisis kritis guna menarik kesimpulan yang mencerminkan kondisi implementasi mitigasi bencana di tingkat desa. Adapun luaran dari penelitian ini adalah pada publikasi jurnal nasional terakreditasi sinta 5.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bonto Katute yang berada di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai memiliki kondisi geografis berupa perbukitan dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Bencana yang paling sering terjadi adalah tanah longsor, dan angin kencang yang mengancam keselamatan warga dan mengganggu aktivitas perekonomian. Keadaan ini menuntut peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam melakukan mitigasi bencana,

baik melalui perencanaan jangka panjang maupun melalui tindakan preventif di tingkat masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Bonto Katute telah berupaya mengintegrasikan isu mitigasi bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Hal ini terlihat dari adanya program mitigasi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Perencanaan tersebut mencakup penataan ruang desa, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana, serta penyusunan regulasi berupa peraturan desa tentang kelestarian lingkungan.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, pemerintah desa mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi evakuasi, serta penyuluhan tentang langkah-langkah menghadapi potensi bencana. Upaya edukasi ini tidak hanya dilakukan secara formal melalui pertemuan, tetapi juga secara informal dengan memanfaatkan forum musyawarah dusun, pengajian, maupun kegiatan gotong royong.

Dalam aspek pembangunan infrastruktur, pemerintah desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk membangun sarana mitigasi bencana. Contoh nyata yang ditemukan di lapangan adalah pembangunan talud penahan tanah di area rawan longsor, serta perbaikan jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat sekaligus meminimalisir dampak kerugian akibat bencana.

Upaya pemerintah desa juga tampak dalam penyediaan sarana pendukung mitigasi bencana. Desa Bonto Katute telah memiliki posko darurat, dan kelompok masyarakat siaga

bencana (KSB) yang siap memberikan informasi dini kepada warga. Walaupun sarana dan prasarana masih sederhana, hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah desa dalam menyiapkan sistem tanggap darurat di tingkat lokal.

Dalam hal koordinasi, pemerintah desa tidak bekerja sendiri. Mereka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPBD, TNI, Polri, Dinas Sosial, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini terutama terlihat ketika terjadi bencana longsor, di mana pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat terdampak dengan lembaga penanganan bencana di tingkat kabupaten. Kerja sama ini mempermudah distribusi bantuan logistik, evakuasi warga, serta rehabilitasi pascabencana.

Selain pendekatan teknis, pemerintah desa juga berperan dalam memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat. masyarakat dilibatkan dalam pembangunan sarana mitigasi sekaligus memperoleh tambahan penghasilan. Selain itu, pemerintah desa mendorong diversifikasi mata pencaharian agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor pertanian yang rawan terganggu akibat bencana.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah desa. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur mitigasi bencana yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan, misalnya praktik penebangan pohon di lereng yang meningkatkan risiko longsor. Minimnya teknologi peringatan dini juga membuat masyarakat lebih rentan ketika bencana datang secara tiba-tiba.

Meskipun demikian, secara umum pemerintah Desa Bonto Katute telah memainkan peran yang cukup signifikan dalam mitigasi bencana. Upaya perencanaan yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur mitigasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi dengan

berbagai pihak menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mewujudkan desa yang tangguh bencana. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci yang mendukung efektivitas peran pemerintah desa.

Dengan melihat berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam mitigasi bencana di Desa Bonto Katute telah berjalan cukup efektif meskipun belum maksimal. Ke depan, diperlukan peningkatan dukungan anggaran, penguatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi peringatan dini yang lebih baik. Dengan demikian, risiko bencana di Desa Bonto Katute dapat dikurangi dan ketahanan masyarakat terhadap bencana dapat semakin ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bonto Katute memiliki peran yang cukup signifikan dalam upaya mitigasi bencana di wilayahnya. Peran tersebut tampak melalui integrasi program mitigasi ke dalam perencanaan pembangunan desa, penyusunan peraturan desa yang mendukung pelestarian lingkungan, serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Selain itu, pemerintah desa juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi yang bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sinjai. Kehadiran kelompok masyarakat siaga bencana serta posko darurat semakin memperkuat kesiapsiagaan warga. Di sisi lain, pemerintah desa mampu membangun koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, Dinas Sosial, maupun LSM untuk memperlancar proses evakuasi, distribusi bantuan, dan rehabilitasi pascabencana. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan kendala berupa keterbatasan anggaran desa, rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta

minimnya teknologi peringatan dini yang membuat masyarakat lebih rentan ketika bencana datang secara tiba-tiba. Secara keseluruhan, peran pemerintah desa dalam mitigasi bencana di Desa Bonto Katute sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kondisi desa tangguh bencana yang lebih ideal.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Bonto Katute. Pertama, diperlukan optimalisasi anggaran desa dengan meningkatkan alokasi dana untuk kegiatan mitigasi bencana, khususnya dalam pembangunan infrastruktur pencegahan. Kedua, pemerintah desa perlu memperkuat program sosialisasi dan edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kelompok pemuda agar kesadaran warga terhadap mitigasi bencana semakin meningkat. Ketiga, pemanfaatan teknologi sederhana untuk sistem peringatan dini sangat penting untuk mempercepat penyampaian informasi ketika bencana akan terjadi. Keempat, kelembagaan kelompok masyarakat siaga bencana perlu diperkuat melalui pelatihan rutin, simulasi evakuasi, serta penyediaan dukungan logistik agar lebih tanggap dalam menghadapi bencana. Kelima, perlu dikembangkan program ekonomi produktif berbasis ketahanan bencana, seperti pertanian berkelanjutan dan kegiatan padat karya mitigasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai strategi pencegahan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan Desa Bonto Katute dapat lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana sekaligus menjadi contoh desa tangguh bencana di Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

Admiral Musa, Julius et al. 2020. "Implementasi Program Desa Tangguh Bencana Di Desa." *Swabumi* 8(1): 1–10.

Arsyad, M. 2017. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi *Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*.

Chaudhary, Muhammad T, and Awais Piracha. 2021. "Natural Disasters — Origins , Impacts , Management." : 1101–31.

Fitriana Selvia, Vivi Friskila Angela. 2024. "Model Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) Dalam Penanganan." 7: 75–84.

Indonesia, Presiden Republik. 1999. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Memutuskan :*

INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. 2007. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA*.

Ira Monalia, Erika Dewi Noorratri. 2024. "GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPIBENCANA GUNUNG MELETUS DI DESA JRAKAHSELO BOYOLALI Ira Monalia 1 , Erika Dewi Noorratri 2 1,2." 2(4): 790–807.

Kiki Rasmala Sani, Syamsuddin. 2020. "Peran Lembaga Muhammadiyah Dalam Mitigasi Bencana Di Kabupaten Sinjai." 13: 37–45.

Muhammad Feri Prasnanda, Achmad Yusuf. 2024. "Interdisciplinary Explorations in Research." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2: 234–51.

RI, BPK. 2014. *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.

Sarwadi, Ridho Adam, Istijabatul Aliyah, and Tendra Istanabi. 2023. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Mitigasi Bencana Longsor Di Desa Wisata Lereng Gunung Lawu , Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus : Desa Nglebak Dan Kelurahan Tawangmangu)." *Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 24(4): 58–73.

Sugianto, Exsi Aprilia, and Slamet Usman Ismanto. 2025. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Desa Jangkurang Melalui Tembok Penahan Tanah (TPT)." 24: 1–16.

Sugiharyanto, Satriyo Wibowo, Taat Wulandari,. 2015. "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Ips Terhadap Mitigasi Bencana Gempa Bumi." *Jipsindo* 2(1): 161–82.